

Proyek Terowongan Diapresiasi Wapres



SUMBER : WWW.KALTIMPOST.CO.ID KAMIS, 13/02/2025

SAMARINDA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja ke Samarinda, Rabu (12/2). Ini adalah kunjungan pertama mantan Wali Kota Solo itu ke Kota Tepian sebagai Wapres. Tiba di Samarinda, Gibran bersama istrinya, Selvi Ananda mengunjungi titik pertama. Yakni Puskesmas Remaja yang berada di kawasan Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, sekitar pukul 14.16 Wita.

Gibran langsung meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, termasuk mengecek Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah berjalan. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda dr Ismid Kusasih mengungkapkan, Gibran langsung meninjau pelayanan puskesmas serta berinteraksi dengan para petugas medis. Beberapa pertanyaan seputar layanan kesehatan pun diajukannya. Selain itu, Wapres memberikan apresiasi terhadap kebersihan Puskesmas yang dikunjunginya "Saya sempat mendengar Pak Gibran mengatakan Puskesmas ini bersih," ujar Ismid, Rabu (12/2).

Meski demikian, sebut dia, Gibran juga memberikan sejumlah arahan terkait pelaksanaan Program CKG. "Beliau menekankan pentingnya meningkatkan sosialisasi Program CKG karena ini merupakan program nasional," jelasnya. Dari total 26 Puskesmas di Samarinda, Puskesmas Remaja menjadi pilihan kunjungan Wapres. Saat ditanya alasan pemilihan lokasi tersebut, Ismid mengaku tidak mengetahui secara pasti. "Semua Puskesmas di Samarinda memiliki fasilitas yang baik. Saya juga kurang tahu mengapa Pak Gibran memilih Puskesmas ini," bebrnya.

Setelah selesai, di luar Puskesmas sudah banyak warga yang menunggu Gibran. Para ibu-ibu membawa sejumlah anaknya. Pada kesempatan itu, Wapres menyempatkan diri untuk memberikan sebuah buku disertai alat tulis. Namun, dari puluhan warga itu ada pula yang menaruh kekecewaan. Salah satunya adalah Yuli. Warga Jalan Kemakmuran, Gang Aman itu mengaku sudah menunggu kedatangan Gibran. Meski dilanda hujan ringan, Yuli dan dua anaknya tetap bertahan hingga dirinya bisa berswafoto dengan Gibran. Namun keinginannya itu tak terpenuhi. “ Kami dapat buku tulis dan alat tulis. Saya bawa dua anak saya rela hujan-hujan menunggu Pak Gibran keluar dari Puskesmas. Tapi waktu minta foto, dia enggak mau,” ujarnya seusai Gibran bergeser meninjau tempat lain.

Tak seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), sambung dia, ketika Jokowi berkunjung ke Samarinda tepatnya di Pasar Merdeka, sejumlah warga yang ingin berswafoto diterimanya. “Kalau dia enggak mau kayaknya. Padahal saya sudah tunggu dari tadi. Berbeda dengan Pak Jokowi, dapat sembako, dapat uang, kalau ini hanya buku,” kesal Yuli.

KUNJUNGI STADION

Sementara itu, Gibran tiba di Stadion Segiri Samarinda sekitar pukul 15.02 Wita. Di sana, ratusan pelajar dari beberapa sekolah di Samarinda sudah siap menyambutnya. Namun sayang, ketatnya pengawalan Paspampres mendampingi orang nomor dua di Indonesia itu membuat awak media kesulitan meminta konfirmasi perihal kunjungan kerjanya.

Pada bagian lain, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan hasil dialognya dengan mantan Wali Kota Solo, Gibran. Menurutnya, Wapres memberikan apresiasi terhadap Proyek Terowongan Samarinda yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan di kawasan Gunung Manggah, Kecamatan Sambutan. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai titik rawan kepadatan lalu lintas di Samarinda. "Pak Wapres sangat mengapresiasi proyek terowongan ini," ujar Andi Harun.

Pria yang akrab disapa AH itu menambahkan empat hari sebelum kunjungan Wapres ke Samarinda, proyek tersebut telah dipertimbangkan sebagai salah satu agenda utama dalam kunjungan kerja. "Hasil analisis dari Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa proyek terowongan itu merupakan salah satu program representatif dalam kunjungan kerja Wapres. Beliau bersama Ibu Selvi sangat mengapresiasi pembangunan terowongan ini dan menanyakan beberapa hal terkait proses pembangunannya," tuturnya.

Selain mengapresiasi proyek terowongan, Gibran juga menanggapi usulan Pemkot Samarinda terkait penyempurnaan proyek tersebut. "Saya jujur tadi, kita membiayai banyak hal, dan karena kondisi fiskal juga terbatas, mungkin pada suatu waktu kami mohon bisa dibantu dukungan anggaran," tutur Andi Harun. Peruntukan anggaran yang dimaksud, ucap dia, yakni berkaitan dengan pelebaran Jalan Sultan Alimudin. Sebab, proyek terowongan itu menjadi bagian dari sistem konektivitas yang menghubungkan beberapa infrastruktur strategis, termasuk Jembatan Achmad Amins dan akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

"Pak Wapres mengatakan proyek ini harus didukung karena berkaitan dengan infrastruktur publik. Manfaatnya tentu sangat besar bagi masyarakat," tutup AH. Sebagai informasi, proyek terowongan itu dibangun menggunakan APBD. Terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimudin dengan Jalan Kakap itu memiliki panjang 700 meter dan menelan anggaran sebesar Rp395 miliar. **(rd)**

Sumber Berita :

1. www.kaltimpost.co.id, Proyek Terowongan Diapresiasi Wapres, 13/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
2. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
 - (2) Dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
- e. hasil layanan jasa konstruksi.